

The background features a collage of green elements: a large, detailed leaf with visible veins in the upper center; several smaller, solid green circles of varying sizes scattered around; and a dark green silhouette of a vine with small leaves curving across the bottom right.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DINAS PENGAIRAN ACEH

TAHUN 2020

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020**  
**DINAS PENGAIRAN ACEH**  
**ALAMAT: JL. IR. MOHD. THAHER NO. 18 LUENG BATA - BANDA ACEH**

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT & WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						SOFT COPY	HARD COPY	
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>								
<b>a. Informasi Badan Publik</b>								
1	Profil Dinas	Memuat informasi sejarah berdirinya Dinas, Visi, misi, Kewenangan, Logo, Struktur Dinas, Unit Kerja, Tupoksi Dinas dan Bidang	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2018	V	V	Sesuai Masa Restensi Arsip
2	Alamat Dinas	Memuat Daftar alamat dan Kantor Dinas Pengairan di Kabupaten/Kota	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2018	V	V	5 Tahun
3	Visi dan Misi Dinas	Berisi pandangan kedepan dan tujuan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai visi	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2018	V	V	5 Tahun
4	Fungsi dan Tugas Dinas	Berisi sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2018	V	V	5 Tahun
5	Struktur Organisasi	Susunan Organisasi Dinas Pejabat Struktural	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	5 Tahun
6	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak	Kondisi Jumlah Pegawai dan Tenaga Kontrak di Lingkup Dinas	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	5 Tahun
7	Rekap Kepangkatan (DUK) Pegawai Dinas	(1) Data-data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK); (2) Informasi Struktur PNS Honorer dan Kontrak; (3) Data Pejabat Struktural	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	5 Tahun
<b>b. Informasi Ringkasan Program/Kegiatan</b>								
1	Nama Program dan Kegiatan	Ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2018	V	V	5 Tahun
2	Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2019	Anggaran Kegiatan Perubahan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2019	V	V	1 Tahun

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT & WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						SOFT COPY	HARD COPY	
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>								
3	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019	Rincian Rencana Kerja Anggaran berisi uraian kegiatan	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2018	V	V	1 Tahun
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019	Anggaran Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2018	V	V	1 Tahun
5	Renstra Dinas Pengairan Tahun 2017-2022	Informasi yang memuat Program Kerja 5 tahun	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2016	V	V	5 Tahun
6	Renja Dinas Pengairan Tahun 2020	Informasi yang memuat Program Kerja tahun 2020	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2019	V	V	1 Tahun
7	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pengairan Tahun 2019	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2019	V	V	1 Tahun
<b>c. Informasi Tentang Kinerja</b>								
1	Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengairan Tahun 2019	Informasi terkait capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis Dinas Pengairan Aceh	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh (LPPA) Dinas Pengairan Tahun 2019	Informasi terkait capaian kinerja yang ditargetkan Dinas Pengairan Aceh	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
3	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengairan Tahun 2019	Informasi terkait capaian kinerja pertanggungjawaban Dinas Pengairan Aceh	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
4	Perjanjian Kinerja Dinas Pengairan tahun 2019	Informasi yang memuat sasaran strategis, target outcome yang akan dicapai Dinas Pengairan Aceh	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2019	V	V	1 Tahun
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan tahun 2019	Informasi yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan penanggungjawab kegiatan Dinas	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2019	V	V	1 Tahun

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT & WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						SOFT COPY	HARD COPY	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>								
<b>d. Ringkasan Laporan Keuangan</b>								
1	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2019	Informasi mengenai pencapaian program kegiatan baik secara fisik di lapangan dan neraca keuangan masing masing program atau kegiatan Tahun 2019	Subbag Keuangan dan Pengelolaan Asset	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
2	Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2019	Berisi informasi kegiatan dan anggaran baik neraca, arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan	Subbag Keuangan dan Pengelolaan Asset	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
3	Inventaris dan Asset Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019	Informasi Inventaris dan Asset Dinas	Subbag Keuangan dan Pengelolaan Asset	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
<b>e. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik</b>								
1	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima Tahun 2019	Informasi terkait permintaan data yang tersedia dan tidak tersedia di Dinas Pengairan Aceh	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	5 Tahun
<b>f. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan</b>								
1	Daftar Pergub surat keputusan Kepala dinas dan Perjanjian Kerjasama	Informasi terkait peraturan gubernur terkait pengairan, surat keputusan kepala dinas dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2019	V	-	1 Tahun
<b>g. Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik</b>								
1	Standar Prosedur Operasional memperoleh informasi	Informasi tentang tata cara memperoleh informasi di Badan Publik	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
<b>h. Informasi tentang Hak dan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau pelanggaran</b>								
1	Daftar Laporan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran	Informasi tentang pelanggaran pada bangunan SDA	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
<b>i. Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa</b>								
1	Daftar Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi yang memuat pemenang tender pengadaan barang dan jasa tahun sebelumnya	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020	V	V	1 Tahun
<b>j. Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat</b>								
1	Jalur Evakuasi	Informasi terkait bagan jalur evakuasi di Gedung Dinas Pengairan Aceh	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan, 2020		-	5 Tahun

Banda Aceh, 06 Februari 2020

KEPALA DINAS PENGAIRAN

Ir. MAWARDI

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640502 199203 1 009



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020**  
**DINAS PENGAIRAN ACEH**  
**ALAMAT: JL. IR. MOHD. THAHER NO. 18 LUENG BATA - BANDA ACEH**

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI		MASA RETENSI ARSIP
						SOFT COPY	HARD COPY	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SECARA SERTA MERTA</b>								
<b>a Informasi Yang Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum</b>								
1	Banjir dan Kekeringan	Informasi terkait dengan tinggi muka air (AWRL)	- UPTD P.I Wilayah II - UPTD P.I. Wilayah III - UPTD P.I. Wilayah IV - UPTD P.I. Wilayah V	UPTD	Dinas Pengairan,	V	-	
<b>b Standar Pengumuman Informasi</b>								

Banda Aceh, 06 Februari 2020  
**KEPALA DINAS PENGAIRAN**



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020**  
**DINAS PENGAIRAN ACEH**  
**ALAMAT: JL. IR. MOHD. THAHER NO. 18 LUENG BATA - BANDA ACEH**

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMAASI	TEMPAT & WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI		MASA RETENSI ARSIP
						SOFT COPY	HARD COPY	
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>								
<b>a. Daftar Informasi Publik</b>								
1	Data informasi terkait daftar informasi publik	Data tentang informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat dan informasi yang dikecualikan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
<b>b. Informasi tentang peraturan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan dan kerjasama dengan pihak ketiga</b>								
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974	Informasi tentang Pengairan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Presiden Republik Indonesia, 1974	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	Informasi tentang Keterbukaan Informasi Publik	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Presiden Republik Indonesia, 2008	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009	Informasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Presiden Republik Indonesia, 2009	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007	Informasi tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Presiden Republik Indonesia, 2007	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
5	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015	Informasi tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
6	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015	Informasi tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
7	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015	Informasi tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
8	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015	Informasi tentang Penggunaan Sumber Daya Air	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
9	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015	Informasi tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT & WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI		MASA RETENSI ARSIP
						SOFT COPY	HARD COPY	
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>								
10	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015	Informasi tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
11	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015	Informasi tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
12	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015	Informasi Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
13	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015	Informasi tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi berdasarkan kewenangan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
14	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015	Informasi tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
15	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015	Informasi tentang Komisi Irigasi	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
16	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015	Informasi tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
17	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015	Informasi tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
18	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015	Informasi tentang Pengelolaan Aset Irigasi	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
19	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015	Informasi tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Air Minum	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip
20	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015	Informasi tentang Bendungan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	V	V	Sesuai Masa Retensi Arsip

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT & WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI		MASA RETENSI ARSIP
						SOFT COPY	HARD COPY	
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>								
21	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015	Informasi tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
22	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015	Informasi tentang Rawa	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
23	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015	Informasi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	KemenPUPR, 2015	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
24	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2014	Informasi tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Aceh	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Gubernur Aceh, 2014	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
25	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/173/2017	Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Gubernur Aceh	Setda Aceh, 2017	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
26	Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011	Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Gubernur Aceh, 2011	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
27	Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017	Informasi tentang irigasi	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Gubernur Aceh, 2017	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
<b>c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11</b>								
<b>d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan</b>								
1	Data Jumlah pegawai per jabatan per golongan (DUK)	Informasi terkait pegawai perjabatan dan pergolongan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan daftar urutan kepangkatan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
2	Rekapitulasi pembayaran tunjangan prestasi kerja sesuai kinerja	Informasi terkait pembayaran TPK berdasarkan kinerja	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan	-	-	Sesuai Masa Retensi Arsip
3	Profil pejabat dan pegawai Badan Publik	Informasi terkait profil pejabat dan pegawai Badan publik (Curikulum Vitae)	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
4	SOP Badan Publik	Informasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Publik	UPTD PJP Wilayah IV	UPTD PJP Wilayah IV	Dinas Pengairan	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip



NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT & WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI		MASA RETENSI ARSIP
						SOFT COPY	HARD COPY	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>								
<b>e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga</b>								
<b>f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,</b>								
1	Data surat perintah tugas dinas dalam dan luar daerah	Informasi terkait surat tugas dalam mengikuti kegiatan yang bersifat kedinasan	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan	-	-	Sesuai Masa Retensi Arsip
<b>g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau laporan penataan izin yang diberikan,</b>								
<b>h. Data perbendaharaan atau inventaris</b>								
1	Laporan Inventaris dan Asset Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019	Laporan Inventaris dan Asset Dinas	Subbag Keuangan dan Pengelolaan Asset	Sekretariat	Dinas Pengairan	√		Sesuai Masa Retensi Arsip
<b>i. Rencana Strategis dan Rencana Kerja</b>								
1	Laporan Rencana dan strategis Dinas Pengairan Aceh tahun 2017 - 2022	Kebijakan pembangunan Pengairan dalam Tahun 2017 - 2022.	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
2	Laporan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020	Informasi yang memuat Program Kerja Tahun 2020	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
3	Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengairan Tahun 2019	Informasi terkait capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis Dinas Pengairan Aceh	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip
<b>j. Agenda Kerja Pimpinan Satuan</b>								
1	Data Agenda Kegiatan Pimpinan Badan Publik	Informasi Agenda Kegiatan Pimpinan Dinas	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretariat	Dinas Pengairan	-	-	Sesuai Masa Retensi Arsip
<b>k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik</b>								
1	Data informasi terkait sarana dan prasarana layanan dan informasi publik	Informasi terkait sarana dan prasarana layanan dan informasi publik	Subbag Program, Informasi dan Humas	Sekretariat	Dinas Pengairan	√	√	Sesuai Masa Retensi Arsip

Banda Aceh, 06 Februari 2020

KEPALA DINAS PENGAIRAN



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2020**  
**DINAS PENGAIRAN ACEH**  
**ALAMAT: JL. IR. MOHD. THAHER NO. 18 LUENG BATA - BANDA ACEH**

NO.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN ( DASAR HUKUM )	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	2	3	4	5	6
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN</b>					
<b>a. Kepegawaian</b>					
1	Daftar Pribadi Pegawai - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general check up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Menduduki jabatan publik	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang
2	Penjatuhan Hukuman disiplin - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/ Badan/ Lembaga - Keputusan hukuman disiplin dari pejabat berwenang - Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin dari BKA - Keputusan hukuman disiplin dari BKA - Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu : PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 31 ayat 1 dan 2; dan Peraturan BKN No. 21 Tahun 2010	Sampai memperoleh Ketetapan dari yang berwenang	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Dokumen Perceraian - Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan - Dokumen Notulensi rapat Tim penyelesaian kasus perceraian - Dokumen dan formulir isian pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai menduduki jabatan publik	Akan mengungkapkan data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECCUALIAN ( DASAR HUKUM )	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	2	3	4	5	6
4	Biodata - PNS Elektronik - Berkas dan arsip dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai menduduki jabatan publik	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf j yaitu: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 4	a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai menduduki jabatan publik	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Data absensi pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 4	Sampai persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan	Sebagaimana SKP dan DP3, dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai dan dapat terjadi penyalahgunaan informasi	Mengamankan informasi/ rahasia pribadi pegawai/ staf
<b>b. Keuangan dan Aset</b>					
1	Data pihak ketiga dalam SP2D	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
2	Laporan keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan belum ditetapkan dalam qanun pertanggungjawaban APBA	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 302 ayat 1 dan 2	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara 2. Apabila dibuka akan memberika informasi yang tidak akurat	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik
3	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai menduduki jabatan publik	Dapat mengungkapkan rahasia (kekayaan) pribadi seseorang	Melindungi rahasi pribadi seseorang
4	Informasi tentang Wajib Pajak Daerah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 172 ayat 1 dan 2	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang berwenang dan terkait dengan proses pengadilan dan pemeriksaan keuangan dan instansi yang berwenang	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

NO.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN ( DASAR HUKUM )	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	2	3	4	5	6
<b>c. Perencanaan Daerah</b>					
1	Usulan Rancangan Dokumen PPAS	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai ditandatangani nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
2	Data mustahik yang belum ditetapkan oleh kepala BMA	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 1 dan 3	Sampai ditetapkan/ diputuskan melalui surat keputusan Kepala Badan Baitul Mal	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
3	Nomor HP dan Rekening mustahik	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 1 dan 3	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
4	Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah tentang Penyaluran ZIS yang belum disahkan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai SK DPS ditanda tangani	Menimbulkan ketidakpastian syariah	Mendapatkan kepastian hukum syariah terhadap pendayagunaan ZIS
5	Laporan/ Pengaduan Masyarakat terhadap suatu aliran Sempalan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 2	Sampai dikeluarkannya fatwa MPU Aceh	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan membahayakan pelapor/ saksi	Melindungi hak pribadi seseorang
6	Nama Perusahaan yang sedang di Audit Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Sampai dikeluarkannya surat keputusan tentang sertifikasi halal oleh MPU	Informasi yang apanila dibuka dan diberikan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak pribadi perusahaan
<b>d. Pengadaan Barang/ Jasa</b>					
1	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan j; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 6 huruf b; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan	Mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat antara peserta lelang	Melindungi proses lelang sampai menemukan hasil pemenang yang dapat dipertanggungjawabkan
2	Proses evaluasi pengadaan barang/ jasa termasuk penyelesaian sengkah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/ kontrak	Mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat antara peserta lelang	Melindungi proses lelang sampai menemukan hasil pemenang yang dapat dipertanggungjawabkan
3	Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang terdapat dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h angka 3	Sampai dengan persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
4	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

NO.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN ( DASAR HUKUM )	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	2	3	4	5	6
<b>e. Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>					
1	Daftar User dan Password Server/ Aplikasi/ Perangkat TIK	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
2	Daftar konfigurasi Server/ Router/ Komputer	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
3	Daftar Konfigurasi Perangkat Firewall	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
4	Daftar dan Profil Administrator / Pengelola Server	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi data pribadi
5	Spesifikasi Perangkat Server/ Router/ Perangkat TIK	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data

NO.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN ( DASAR HUKUM )	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	2	3	4	5	6
6	Daftar Port yang dibuka dan atau ditutup	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
7	Bagan Topologi Jaringan Intranet/ Internet Pemerintah Aceh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
8	Source Code Aplikasi Khusus	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
9	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	Undang-undang ITE pasal 30; PP PSTE; Permenkominfo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
10	Hasil Audit Keamanan Informasi	PP PSTE; Permenkominfo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat data

NO.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN ( DASAR HUKUM )	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	2	3	4	5	6
<b>f. Umum/ Kesekretariatan</b>					
1	Surat-surat/ memo/ memorandum/ nota dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia	Pasal 17 Undang-undang KIP huruf i	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Menghindari kesalahan penggunaan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
2	MOU dan perjanjian kerjasama luar negeri yang bersifat rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf f angka 1, 2, 3, dan 4	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Merugikan posisi tawar, daya tawar dan strategi yang diambil negara	Menjaga privasi dan keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan
3	Risalah rapat yang bersifat rahasia, meliputi : - laporan singkat - catatan rapat - slide presentasi dan/ atau transkrip - rekaman suara/ pembicaraan - keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Naskah pidato Pimpinan yang belum dibaca	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai naskah pidato dibacakan	Dapat menimbulkan perbedaan penafsiran isi naskah pidato	Menjaga keakuratan isi naskah pidato
5	Identitas pelapor penyelenggaraan pelayanan publik	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a (angka 2); Perpres Nomor 76 Tahun 2013 pasal 13 (angka 3); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c (angka 6)	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan	Mengungkapkan informasi pribadi; penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi informasi pribadi; mencegah penyalahgunaan dari pihak lain

Banda Aceh, 06 Februari 2020

KEPALA DINAS PENGAIRAN



**I. MAWARDI**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640502 199203 1 009